

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2014, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2006, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradya Pramita, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian hukum, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ND Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pandu, Yudha, 2004, Klien Dan Advokat Dalam Praktek, PT. Abadi, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta
- S. Nasution, 2006, Metode Research (Penelitian Ilmiah), cetakan ke-8, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saydam, Gouzali Saydam, 2003, Soal Tanya Jawab Managemen dan Kepemimpinan , Djambatan, Jakarta.
- , 2014, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta.

Sugiono, 2001, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung.

Sujanto, 1983, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1987, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Bandung.

Sumardjono Maria SW, 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Yogyakarta.

Tedjosaputra, Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Cetakan 3 Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.

Tobing, G.H.S lumban, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga.

-----, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, cetakan ke 5, Airlangga, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis

Rona Ayu Edithya Margareth, "Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman," *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Andre Ambrosius Abraham Paat, "Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengatasi Notaris Di Kota Manado", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan
Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5491.

Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris

D. Internet

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, '' Syarat Dan Tata Cara
Pengangkatan Notaris, ''[Http://www.Kemenkumham. Go.Id/V2/
Informasi. Publik/Faq/220-F-A-Q-Layanan-Ditjen-Ahu](http://www.Kemenkumham.Go.Id/V2/Informasi.Publik/Faq/220-F-A-Q-Layanan-Ditjen-Ahu)'Diakses
pada tanggal 11 November 2015.